

PERAN KOMISI E DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Ayub Zebua¹, Gerry Simanjuntak², Eflin Simbolon³, Lewi Marpaung⁴, Ayu Tanjung⁵,
Artha Lumban tobing⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

email korespondensi: ayub.zebua@student.uhn.ac.id¹

Email: ayub.zebua@student.uhn.ac.id¹, gerry.gunawan@student.uhn.ac.id²,
eflin.efridonda@student.uhn.ac.id³, lewi.marpaung@student.uhn.ac.id⁴, ayu.andira@student.uhn.ac.id⁵,
artha.tobing@uhn.ac.id⁶

Diajukan : 22/12/2025
Direvisi : 29/12/2025
Diterima : 05/01/2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Commission E of the Regional House of Representatives (DPRD) of North Sumatra Province in carrying out its oversight function in the field of public welfare. The focus of the study includes the sectors of education, health, employment, and social welfare. This research is based on the author's internship experience at Commission E of the DPRD of North Sumatra Province. Data were obtained through direct observation of institutional activities, such as plenary meetings, public hearings, and administrative activities. The results of the study indicate that Commission E plays a role as a mediator between the community and the regional government in following up on various public welfare issues. However, in practice, the implementation of the oversight function still faces several obstacles, such as limited data availability, communication dynamics among actors, and bureaucratic complexity. The conclusion of this study shows that the effectiveness of Commission E's role is not only determined by formal authority but is also influenced by the quality of coordination, availability of information, and commitment of all involved parties. Therefore, strengthening coordination and improving transparency are important factors in enhancing the oversight performance of Commission E of the Regional House of Representatives of North Sumatra Province.

Keyword: DPRD Sumatera Utara, Public Welfare, and Government Organization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang kesejahteraan rakyat. Fokus kajian meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta kesejahteraan sosial. Penelitian ini didasarkan pada pengalaman magang penulis di Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Data diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas kelembagaan, seperti rapat paripurna, rapat dengar pendapat, serta kegiatan administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi E berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi pengawasan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan data, dinamika komunikasi antar aktor, dan kompleksitas birokrasi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran Komisi E tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas koordinasi, ketersediaan informasi, serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan peningkatan transparansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja pengawasan Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: DPRD Sumatera Utara, Kesejahteraan Masyarakat, Dan Organisasi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pengawasan yang efektif sangat penting dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Kesejahteraan rakyat merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mencakup berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program kesejahteraan rakyat sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, permasalahan koordinasi antar lembaga, serta kurang optimalnya implementasi kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peran lembaga pengawas, khususnya DPRD, untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Di tingkat Provinsi Sumatera Utara, fungsi pengawasan DPRD terhadap bidang kesejahteraan rakyat secara khusus dilaksanakan oleh Komisi E. Komisi ini memiliki ruang lingkup tugas yang meliputi pengawasan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan fungsinya, Komisi E melakukan berbagai kegiatan pengawasan, seperti rapat kerja dengan organisasi perangkat

daerah, rapat dengar pendapat dengan masyarakat, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Peran Komisi E menjadi sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

Meskipun secara normatif Komisi E memiliki kewenangan pengawasan yang jelas, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat, dinamika komunikasi antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta kompleksitas birokrasi dalam proses pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini dapat mempengaruhi optimalisasi peran Komisi E dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas program kesejahteraan rakyat di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang kesejahteraan rakyat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komisi E, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik serta memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program kesejahteraan rakyat di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode observasi sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Metode observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian untuk memperoleh informasi yang faktual dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung proses pelaksanaan

fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara, termasuk dinamika kelembagaan, pola komunikasi antar aktor, serta mekanisme kerja yang berlangsung dalam lingkungan DPRD. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung (direct observation), yaitu peneliti terlibat secara langsung di lokasi penelitian melalui kegiatan magang di Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 1. Kegiatan Komisi E DPRD SUMUT

Melalui keterlibatan tersebut, peneliti dapat mengamati berbagai aktivitas kelembagaan, seperti rapat paripurna, rapat komisi, rapat dengar pendapat, serta kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang kesejahteraan rakyat. Observasi dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan aspek-aspek yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan peran Komisi E dalam mengawasi sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan observasi, peneliti berperan sebagai observator non-partisipan terbatas, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, tetapi hanya mengamati dan mencatat berbagai aktivitas yang terjadi.

Data yang diperoleh kemudian didokumentasikan dalam bentuk catatan lapangan (field notes), yang selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi pola, peran, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat empiris dan objektif, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan

fungsi pengawasan Komisi E. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu mendukung analisis penelitian secara mendalam dan menghasilkan temuan yang relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan magang di Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara, diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap bidang kesejahteraan rakyat. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan formal dan administratif yang menjadi bagian dari mekanisme kerja kelembagaan DPRD. Kegiatan utama yang diamati meliputi rapat paripurna, rapat komisi, rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD), serta rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam pelaksanaan rapat komisi, Komisi E secara aktif melakukan pembahasan terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Rapat ini menjadi forum bagi anggota Komisi E untuk memperoleh informasi dari OPD terkait mengenai pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Selain itu, rapat dengar pendapat juga menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan permasalahan yang mereka hadapi secara langsung kepada DPRD. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa Komisi E berperan sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan OPD terkait untuk memperoleh klarifikasi dan solusi atas permasalahan yang ada. Proses ini mencerminkan peran DPRD sebagai lembaga representatif yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, terdapat beberapa

kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses terhadap data dan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan program kesejahteraan rakyat. Selain itu, dinamika komunikasi antara DPRD dan pihak eksekutif terkadang mempengaruhi kecepatan dan efektivitas tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemukan. Kompleksitas birokrasi juga menjadi faktor yang dapat memperlambat proses pengawasan dan penyelesaian permasalahan yang ada.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa lembaga legislatif memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil observasi, fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan secara formal melalui rapat-rapat kelembagaan, tetapi juga melalui komunikasi langsung dengan masyarakat dan instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa Komisi E menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas sekaligus representasi kepentingan masyarakat. Peran Komisi E sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah mencerminkan fungsi representatif DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Melalui mekanisme rapat dengar pendapat dan koordinasi dengan OPD, Komisi E berupaya memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Proses ini merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan partisipatif. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ketersediaan data dan informasi yang terbatas dapat menghambat proses evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang belum optimal juga dapat mempengaruhi efektivitas tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Kompleksitas struktur birokrasi menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa

setiap permasalahan yang ditemukan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan efektif. Meskipun demikian, secara umum Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kegiatan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan koordinasi dengan berbagai pihak menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa program kesejahteraan rakyat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa peran Komisi E tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan kesejahteraan rakyat telah berjalan secara kelembagaan, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi, ketersediaan informasi, dan efektivitas komunikasi antar pihak terkait. Upaya peningkatan transparansi, akses informasi, dan sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi fungsi pengawasan DPRD di bidang kesejahteraan rakyat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan magang di Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa Komisi E memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi pengawasan, penyerapan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kebijakan publik yang berkaitan dengan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kebudayaan dan pariwisata. Bidang-bidang

tersebut merupakan sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga keberadaan Komisi E menjadi sangat relevan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil pengamatan penulis selama mengikuti berbagai kegiatan Komisi E, seperti rapat paripurna, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat, menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Komisi E di lapangan tidak hanya bersifat formal sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika komunikasi antar aktor, perbedaan kepentingan, serta kompleksitas birokrasi pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, Komisi E tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mediator antara masyarakat, instansi pemerintah, dan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kesejahteraan rakyat.

Pengalaman magang ini memberikan pemahaman kepada penulis bahwa efektivitas peran Komisi E tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas koordinasi dengan mitra kerja, ketersediaan data dan informasi yang akurat, serta komitmen dari anggota dewan dalam menindaklanjuti setiap permasalahan yang disampaikan. Dalam beberapa kasus, keterbatasan data dan perbedaan pandangan antar pihak menjadi kendala yang memengaruhi kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan. Selain itu, kegiatan magang ini juga memberikan gambaran nyata kepada penulis mengenai bagaimana proses administrasi publik dijalankan dalam lingkungan lembaga legislatif daerah. Penulis menyadari bahwa proses pengambilan kebijakan tidak selalu berjalan secara linear dan sederhana, melainkan

melalui tahapan diskusi, negosiasi, serta pertimbangan berbagai kepentingan.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik administrasi publik di lapangan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan memerlukan kemampuan komunikasi serta kerja sama yang baik antar seluruh pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, kegiatan magang di Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak hanya memberikan pengalaman kerja secara teknis, tetapi juga membentuk cara pandang penulis yang lebih kritis dan realistis terhadap peran lembaga legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui magang ini, penulis memperoleh pemahaman bahwa keberhasilan pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya Komisi E, sangat ditentukan oleh sinergi antara aturan formal, kapasitas sumber daya manusia, sistem birokrasi, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, pengalaman magang ini menjadi bekal penting bagi penulis dalam memahami realitas dunia kerja di bidang administrasi publik dan pelayanan publik di masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta dalam memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini dari awal hingga akhir. Terlebih kepada DPRD Sumatera Utara Komisi E yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kegiatan magang dan pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH, (2014).

Mukhafi, S., Atthahara, H., & Febriantini, K. (2023). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd (Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Terhadap Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Community Development Journal*, 4(6), 13514–13517.

Simatupang, M. (2023). Strategi Komisi E Dprd Sumut (Periode 2019-2024) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara. In *Univeritas Medan Area*.

Faturrohman, M. C., Sudarmanto, K., Junaidi, M., & Sukimin, S. (2023). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah. *Jurnal Juridisch*, 1(1), 10–19.

Arifuddin, N. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah (Vol. 2, Issue 1).